



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 01/188.4.45/Tahun 2025

TENTANG

PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1.2/2644/IJ Tanggal 25 November 2024 tentang Sasaran dan Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 yang mengamanatkan untuk menetapkan Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko Tahun 2025 Lingkup Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 8);
11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 57).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Makassar yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025.

KETIGA : Inspektorat Daerah Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan fungsi Inspektorat Daerah sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, rewiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Inspektorat Daerah Kota Makassar wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Makassar.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025, akan diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Inspektur Daerah Kota Makassar.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Januari 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 01/188.4.45/TaHUN 2025
TENTANG PROGRAM KERJA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TAHUNAN BERBASIS RISIKO
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2025.

PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS
RISIKO PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat Daerah sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja dan ketaatan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Hasil yang diharapkan dari penerapan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan di lingkup Inspektorat Daerah Kota Makassar.

Kompleksnya tugas pengawasan dan keterbatasan sumber daya pengawasan membutuhkan adanya skala prioritas pelaksanaan, sehingga merencanakan pengawasannya menggunakan perencanaan pengawasan berbasis risiko.

Kegiatan utama perencanaan pengawasan berbasis risiko adalah mengalokasikan kegiatan pembinaan dan pengawasan ke area yang memiliki risiko lebih besar yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan pengawasan berbasis risiko lebih besar yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan pengawasan berbasis risiko dapat diterapkan pada perencanaan pengawasan terhadap pemeriksaan tertentu, perencanaan kegiatan pengawasan tahunan yang dituangkan dalam Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko.

Pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah Kota Makassar terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Makassar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi guna meningkatkan kinerja khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata kelola pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), sehingga penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Daerah Kota Makassar diharapkan dapat

memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*Early Warning System*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Pengawasan Internal terdiri dari audit, reuiu, monitoring dan evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai acuan, sasaran dan prioritas pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dalam Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan prioritas berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko serta *Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK*, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tahap Pertama adalah menentukan *audit universe* (peta auditan). Kriteria untuk menentukan peta auditan antara lain: perencanaan pembinaan dan pengawasan; anggaran Perangkat Daerah; dampak ke masyarakat; dan kontribusi terhadap tujuan Pemerintah Daerah. Selanjutnya dibuat *skoring* untuk menentukan Perangkat Daerah terpilih yang akan dijadikan sebagai obyek pengawasan.
- b. Tahap Kedua adalah menentukan program prioritas yang akan dijadikan sebagai obyek pengawasan. Kriteria yang digunakan untuk menentukan prioritas tersebut berdasarkan faktor risiko antara lain kontribusi terhadap tujuan Pemerintah Daerah; risiko *inheren*; anggaran program; signifikansi keberhasilan program; dampak terhadap masyarakat; keahlian personil APIP; pengalaman APIP; dan jumlah SDM. Terhadap pemeriksaan/audit kinerja, program pengawasan yang dipilih adalah berdasarkan program yang memiliki skor “sangat tinggi, tinggi, dan sedang” dengan mempertimbangkan audit kinerja tahun sebelumnya.

Indikator pembinaan dan pengawasan yang menjadi acuan kinerja Inspektorat Daerah Kota Makassar berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1.2/2644/IJ Tanggal 25 November 2024 tentang Sasaran dan Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 antara lain:

- A. Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan ruang lingkup:
 1. Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
 2. Pengawasan Prioritas Daerah yang Memiliki Risiko dan Daya Ungkit Tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Prioritas Daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2025, seperti:

- 1) pengendalian inflasi daerah
 - 2) investasi dan pelayanan publik;
 - 3) penanganan *stunting*; dan
 - 4) swasembada pangan.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:
- 1) Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat; dan
 - 2) Pemeriksaan kinerja.
3. Pengawasan tata Kelola pemerintahan melalui pelaksanaan *Monitoring Centre of Prevention (MCP)*

No	Topik	Sasaran	Fokus
1.	Pengawasan dokumen RKPD dan Pokok Pikiran	Kesesuaian RKPD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> a. kelengkapan dokumen pendukung rancangan RKPD dan usulan pokok pikiran; b. Kesesuaian RKPD dan pokok pikiran dengan RPJMD; c. Kesesuaian nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran penerima; d. Manfaat per program/kegiatan dan pokok pikiran terhadap pembangunan daerah.
2.	Pencegahan korupsi pada penyaluran bantuan keuangan	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran bantuan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyaluran bantuan keuangan sesuai ketentuan terkait Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; b. Kelengkapan dokumen pengajuan bantuan keuangan, antara lain mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan surat permohonan dan proposal; 2. Proses evaluasi yang dilakukan TAPD terhadap usulan yang diajukan; 3. Adanya Pakta Integritas; 4. Tercatat dalam DTKS dan memenuhi kriteria tidak mampu dan penghasilan rendah;

			5. Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.
3.	Pencegahan korupsi pada penyaluran hibah	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran hibah	<p>a. Penyaluran bantuan hibah sesuai ketentuan terkait Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;</p> <p>b. Kelengkapan dokumen pengajuan bantuan keuangan, antara lain mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan surat permohonan dan proposal; 2. Diberikan kepada instansi yang berhak mendapatkan hibah; 3. Pakta Integritas; 4. Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.
4.	Pencegahan korupsi pada penyaluran bantuan sosial	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran bantuan sosial	<p>a. Penyaluran bantuan sosial sesuai ketentuan terkait Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;</p> <p>b. Kelengkapan dokumen pengajuan bantuan sosial, antara lain mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilengkapai surat permohonan dan proposal; 2. Diberikan kepada organisasi diakui; 3. Pengusul dan penerima merupakan pihak yang sama; 4. Pakta Integritas; 5. Tercatat dalam DTKS dan memenuhi kriteria tidak mampu dan penghasilan rendah; 6. Tidak menerima bantuan lain; 7. Bukan pendamping sosial PKH; 8. Tidak ada

			<p>pengelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.</p>
5.	<p>Reviu Standar Harga Satuan</p>	<p>Penyusunan Standar Harga Satuan yang tepat waktu dan efektif mencegah terjadinya penggelumbangan harga</p>	<p>a. Adanya Tim Lintas Perangkat Daerah sebagai penyusun Standar Harga Satuan;</p> <p>b. Adanya sinergi bersama instansi terkait (BPS, Bank Indonesia, dst);</p> <p>c. Penyusunan Standar Harga Satuan dilakukan berdasarkan evaluasi nilai pasar dan beberapa pembandingan berdasarkan kondisi terkini;</p> <p>d. Kelengkapan Standar Harga Satuan sesuai dengan anggaran pemerintah daerah;</p> <p>e. Ketepatan waktu pengesahan Standar Harga Satuan sesuai ketentuan;</p> <p>f. Standar Harga Satuan disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan;</p> <p>g. Implementasi Standar Harga Satuan dalam penatausahaan keuangan daerah.</p>
6.	<p>Reviu Analisis Standar Biaya</p>	<p>Penyusunan Analisis Standar Biaya berdasarkan kebutuhan anggaran pemerintah daerah.</p>	<p>a. Adanya Tim Lintas Perangkat Daerah sebagai penyusun Analisis Standar Biaya;</p> <p>b. Kelengkapan Analisis Standar Biaya berdasarkan kebutuhan anggaran pemerintah daerah dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;</p> <p>c. Kesesuaian Analisis Standar Biaya berdasarkan ketentuan yang diatur oleh kementerian teknis;</p> <p>d. Ketepatan waktu pengesahan Analisis Standar Biaya sesuai ketentuan;</p>

			<p>e. Analisis Standar Biaya disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan;</p> <p>f. Implementasi Analisis Standar Biaya dalam penatausahaan keuangan daerah.</p>
7.	Reviu Rencana kerja dan Anggaran	Reviu terhadap penyusunan dokumen rencana keuangan (tahunan) berdasarkan pagu anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran	<p>a. Kesuaian RKA dengan Renja dan informasi kinerja;</p> <p>b. Kesesuaian total pagu anggaran dengan total pagu alokasi;</p> <p>c. Kesesuaian rincian sumber dana RKA;</p> <p>d. Kesesuaian alokasi anggaran dengan pokok kebijakan belanja;</p> <p>e. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan <i>output</i> kegiatan;</p> <p>f. Kepatuhan penerapan standar biaya;</p> <p>g. Kesesuaian akun dan hal-hal yang harus dialokasikan dalam RKA termasuk yang harus dibatasi;</p> <p>h. Alokasi anggaran honorarium tim;</p> <p>i. Alokasi anggaran yang bersumber dari hibah atau pinjaman.</p>
8.	Audit penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas	Pencegahan terjadinya penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas yang fiktif dan/atau berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara	<p>a. Adanya perencanaan dan petunjuk operasional kegiatan terkait dengan penggunaan honorarium dan perjalanan dinas;</p> <p>b. Penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas (besaran) sesuai dengan standar biaya yang berlaku;</p> <p>c. Ketepatan waktu terhadap pertanggungjawaban anggaran honorarium dan perjalanan dinas;</p> <p>d. Kelengkapan dokumen terhadap pertanggungjawaban anggaran honorarium dan perjalanan dinas sesuai ketentuan berlaku;</p>

			<p>e. Penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas diberikan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan</p> <p>f. Anggaran honorarium dan perjalanan dinas diberikan kepada pihak-pihak yang benar-benar telah melaksanakan kegiatan dengan besaran sesuai dengan ketentuan/standar biaya masing-masing pemerintah daerah.</p>
9.	Pencegahan korupsi pengadaan barang dan jasa strategis	<p>Pencegahan korupsi pengadaan barang dan jasa strategis (kegiatan pengadaan barang dan jasa yang merupakan proyek strategis daerah). Yang dimaksud proyek strategis daerah memenuhi kriteria:</p> <p>a. Kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan nilai tertinggi;</p> <p>b. Proyek strategis yang mendukung visi misi kepala daerah.</p>	<p>Probity audit sekurang-kurangnya pada 5 proyek strategis daerah pada tahapan:</p> <p>a. Perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi kebutuhan (kelayakan, jumlah kebutuhan, dokumen perencanaan/desain, RKBMD mengacu pada standar harga yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, kesesuaian dengan tugas pokok pelaksana); 2) Penetapan (kesesuaian klasifikasi baku komoditas Indonesia (KBLI) atau peraturan teknis terkait); 3) Mekanisme (<i>e-purchasing</i>), pengadaan langsung, tender cepat, dan tender); 4) Jadwal pelaksanaan (uraian tanggal, tidak melewati tahun anggaran, waktu penyelesaian sesuai kebutuhan pengguna); 5) Anggaran (RAB mengacu pada EE, hasil survei harga, perhitungan sendiri, SBU, perhitungan biaya/penganggaran, perkiraan harga wajar).

			<p>b. Persiapan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kelengkapan spesifikasi teknis dan kesesuaian dengan ketentuan;2. Reviu HPS (penetapan, komponen, harga satuan);3. Rencana Umum Pengadaan (RUP telah ditetapkan, pengumuman secara terbuka secara lengkap, nama paket, nama dan alamat PA, lokasi, nilai pekerjaan, waktu pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan);4. Metode pemilihan (kualifikasi, evaluasi penawaran, penyampaian dokumen penawaran, <i>reverse auction</i>, tahapan dan jadwal termasuk sanggah dan banding);5. Rancangan kontrak/ketentuan terkait uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, penyesuaian harga. <p>c. Pemilihan penyedia</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan <i>e-audit</i>;2. Pengumuman dan penjelasan secara terbuka;3. Evaluasi pada saat pelaksanaan pemilihan penyedia sejak diumumkan, pembukaan dokumen dan evaluasi sampai dengan penetapan pemenang;4. Kendala dan addendum pemilihan (jika ada).
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>d. Penyusunan kontrak</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penetapan SPPBJ;2. Reviu rancangan kontrak;3. Substansi kontrak;4. Penandatanganan kontrak;5. Jaminan. <p>e. Pelaksanaan pekerjaan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kesesuaian pelaksanaan dengan kontrak;2. Pemeriksaan lapangan;3. Penerbitan SPMK;4. Kesesuaian progress dan pembayaran;5. Keadaan kahar. <p>f. Serah terima</p> <ol style="list-style-type: none">1. PHO dan FHO;2. Pengambilan referensi atau jaminan pemeliharaan;3. Penyerahan hasil pekerjaan kepada PA/KPA;4. Pencatatan ke dalam aset tetap.
10	Pencegahan korupsi pelayanan publik sektor perizinan	Reviu kinerja pelayanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis)	<p>a. Kelengkapan regulasi dan kebijakan (Perkada, SK Kada, SOP Perizinan Terintegrasi, SOP rekomendasi teknis) yang mendorong layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis);</p> <p>b. Implementasi pelayanan terpadu satu pintu dalam pemberian layanan publik sektor perizinan;</p> <p>c. Adanya Pakta Integritas layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) termasuk upaya dan/atau inovasi untuk menurunkan risiko penyipuan/gratifikasi/pemerasan dalam layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis);</p> <p>d. Adanya aplikasi layanan</p>

			<p>publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) penggunaan aplikasi layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) dalam melaksanakan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis);</p> <p>e. Kelengkapan sarana dan prasarana termasuk profesionalisme sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik (termasuk rekomendasi teknis);</p> <p>f. Adanya <i>Service Level Agreement</i> (SLA) terhadap pelaksanaan perizinan (termasuk rekomendasi teknis) dan ketetapan waktu pelaksanaan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) berdasarkan SLA;</p> <p>g. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/masukan keluhan terkait layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis), termasuk status penanganan pengaduan;</p> <p>h. Adanya target kinerja yang memperhatikan SLA dan penyelesaian pengaduan masyarakat termasuk pemberian sanksi terhadap pelaku penyuapan/gratifikasi/pemerasan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis).</p>
11	Pencegahan korupsi pelayanan publik	Reviu kinerja pelayanan publik pada sektor Pendidikan terutama pada penerimaan peserta didik baru	a. Kebijakan layanan sektor pendidikan yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/

	sektor pendidikan		<p>gratifikasi/ pemerasan;</p> <p>b. Transparansi layanan sehingga mencegah terjadinya penyuapan/gratifikasi/ pemerasan;</p> <p>c. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/masukan/keluhan terkait layanan publik sektor pendidikan serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor pendidikan, termasuk status penanganan pengaduan;</p> <p>d. Inovasi pelayanan publik sektor pendidikan yang mencegah terjadinya penyuapan/gratifikasi/ pemerasan.</p>
12	Pencegahan korupsi pelayanan publik sektor kesehatan	Reviu kinerja pelayanan publik pada sektor Kesehatan tanpa penyuapan/gratifikasi/pemerasan	<p>a. Kebijakan layanan sektor kesehatan yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/gratifikasi/ pemerasan;</p> <p>b. Transparansi layanan sektor kesehatan sehingga mencegah terjadinya penyuapan/gratifikasi/ pemerasan;</p> <p>c. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/masukan/keluhan terkait layanan publik sektor kesehatan serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor pendidikan, termasuk status penanganan pengaduan.</p> <p>d. Inovasi pelayanan publik sektor Kesehatan yang mencegah terjadinya penyuapan/gratifikasi/ pemerasan.</p>
13	Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Kependudu	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor kependudukan dan pencatatan sipil tanpa penyuapan/gratifikasi/pemerasan	<p>a. Kebijakan layanan sektor kependudukan dan pencatatan sipil yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/gratifikasi/ pemerasan.</p>

	kan dan Pencatatan Sipil		<p>b. Transparansi layanan sektor kesehatan sehingga mencegah terjadinya penyusunan/gratifikasi/pemerasan;</p> <p>c. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/masukan/ keluhan terkait layanan publik sektor kependudukan dan pencatatan sipil serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor kependudukan dan pencatatan sipil, termasuk status penyusunan/gratifikasi/pemerasan.</p> <p>d. Inovasi pelayanan publik sektor kependudukan dan pencatatan sipil yang mencegah terjadinya penyusunan/gratifikasi/pemerasan.</p>
14	Pengawasan Dugaan Penyimpangan	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)	<p>Tindak lanjut terhadap hasil revidu/audit jika terindikasi:</p> <p>a. Merugikan keuangan daerah;</p> <p>b. Penyalahgunaan kewenangan;</p> <p>c. Adanya praktik korupsi termasuk penyusunan/gratifikasi/pemerasan.</p>
15	Pencegahan Terjadinya Korupsi pada proses rekrutmen, promosi dan mutasi ASN	Revidu Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, dan Mutasi ASN	<p>a. Pelaksanaan rekrutmen ASN berdasarkan kebutuhan dan kualifikasi yang telah ditentukan.</p> <p>b. Pelaksanaan promosi dan mutasi ASN telah sesuai berdasarkan perimbangan yang memadai.</p> <p>c. Pelaksanaan rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku (tahap, administrasi, substansi).</p> <p>d. Pelaksanaan promosi dan mutasi telah mempertimbangkan kinerja, kepatuhan LHKPN, tidak terlibat</p>

			<p>perkara korupsi, dan pertimbangan lain yang relevan.</p> <p>e. Pengaduan masyarakat pada pelaksanaan rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN (jika ada) beserta tindak lanjutnya.</p>
16	Pencegahan Terjadinya Korupsi pada Penyalahgunaan BMD	Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah	<p>Reviu dapat difokuskan pada reviu umum yang bertujuan untuk penguatan tata Kelola BMD sehingga mencegah penyalahgunaan BMD (<i>database</i>, kebijakan, pengamanan BMD (fisik dan/ atau hukum), rekonsiliasi, inventarisasi BMD bermasalah, dan tindak lanjut temuan BPK); atau reviu pedalaman. Sebagai pendalaman dapat dipilih beberapa alternatif antara lain:</p> <p>a. Reviu terhadap pengadaan tanah (perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, dan pembayaran) - jika pemda ada pengadaan tanah.</p> <p>b. Reviu terhadap pemanfaatan BMD (tahapan penilaian BMD yang dimanfaatkan beserta nilainya, evaluasi terhadap kontrak kerjasama, manfaat ekonomi yang diperoleh Pemda berdasarkan pemanfaatan tersebut) - tujuannya adalah pemanfaatan BMD tidak melemahkan posisi Pemda.</p>
17		Reviu Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	<p>a. Kebijakan/ regulasi yang mendorong optimalisasi pajak dan retribusi daerah.</p> <p>b. Penguatan database pajak dan retribusi daerah.</p> <p>c. Inovasi dan peningkatan pajak dan retribusi</p>

			<p>daerah.</p> <p>d. Upaya penagihan pajak dan retribusi daerah.</p> <p>e. Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak.</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Pengawasan Rutin yang dilakukan Inspektorat Daerah meliputi:

- a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018, Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/303/IJ tanggal 14 Februari 2023 Hal Pedoman Reviu Rencana Pembangunan Daerah, SE 2022 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (*e-Reviu*);
- b. Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018;
- c. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018;
- d. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

5. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No	Sasaran	Fokus
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	<p>Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2.	Meningkatnya nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).	<p><i>Quality assurance</i> keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Meningkatnya Penerapan manajemen risiko.	<p>Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Infrastruktur <ol style="list-style-type: none"> 1) kepemimpinan;

		<ul style="list-style-type: none">2) strategi dan kebijakan manajemen;3) sumber daya manusia;4) kemitraan; dan5) proses manajemen risiko. <p>b. Hasil</p> <ul style="list-style-type: none">1) Aktivitas penanganan risiko; dan2) <i>Outcome</i>.
4.	Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait: <ul style="list-style-type: none">a. Pengawasan pelayanan publik;b. Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);c. Pengawasan keuangan daerah;d. Audit kinerja;e. Perencanaan dan pengawasan berbasis risiko;f. audit investigasi;g. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal;h. <i>Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE)</i>; dani. Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

B. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya merupakan kegiatan selain pengawasan di atas yang juga merupakan kegiatan yang mendukung untuk kegiatan peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, peningkatan nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Layanan Jasa Konsultasi.

Dalam rangka menjabarkan kebijakan yang tertuang dalam Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut dan untuk mewujudkan pengawasan yang efektif, efisien, terarah serta terkordinasi maka disusunlah Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025, yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Makassar agar dapat berjalan selaras dengan sasaran dan tujuan, pelaksanaan tugas dan fungsi, pencapaian visi dan misi.

Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025 juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025 mencakup seluruh kegiatan Pengawasan Intern terdiri dari Audit, Reviu, Monitoring dan Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV menyusun rencana kegiatan

pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan Sekretariat Inspektorat Daerah Kota Makassar mempunyai peran sebagai penunjang kegiatan pengawasan dengan melaksanakan dukungan teknis, dan administratif serta pelaksanaan reuiu yang ditentukan demi kelancaran tugas-tugas pengawasan.

II. DEFINISI

Dalam Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Makassar.
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Makassar.
- c. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- e. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Makassar.
- f. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
- g. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional dan unit kerja instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap instansi pemerintah, lembaga, dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern.
- i. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (JF PPUPD) adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
- j. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- k. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- m. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan Pemeriksaan intern oleh APIP.

- n. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- o. Monitoring adalah suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.
- p. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- q. Pemeriksaan Kinerja adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, serta efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut.
- r. Pemeriksaan Ketaatan adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketaatan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan.
- s. Probit Audit adalah pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/jasa, untuk memberikan pendapat atau simpulan yang obyektif mengenai kesesuaian proses pengadaan barang/jasa tersebut dengan persyaratan kejujuran yang telah ditetapkan.
- t. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khusus.
- u. Audit Investigatif adalah upaya pencarian dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui dan mengungkap kebenaran sebuah fakta mengenai ada/tidaknya penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- v. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan dalam program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- w. Konsultasi adalah kegiatan pelayanan seperti bimbingan teknis, asistensi/pendampingan, dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunanyang dilaksanakan dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis. Penugasan konsultasi tidak mengalihkan tanggung jawab kegiatan dari pemangku kepentingan kepada auditor internal.
- x. Bimbingan teknis adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan nasihat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis.

- y. Asistensi/pendampingan adalah kegiatan membantu instansi/lembaga dalam rangka memperlancar tugas dan memberi nilai tambah bagi instansi/lembaga tersebut.
- z. Sosialisasi adalah proses pemberian, pengadaftasian, penyesuaian, pengenalan, dan penjabaran informasi.

III. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Penetapan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kota Makassar; dan
- b. Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bersinergi.

Sasaran dari Penetapan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan program prioritas strategis pemerintah daerah.

IV. OBJEK PENGAWASAN

Dengan memperhatikan tumpang tindih pengawasan dengan pihak eksternal dan APIP Lainnya, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Investigatif, dan pengawasan mandatori tetap dilaksanakan atas SKPD yang tidak masuk dalam daftar Pengawasan Berbasis Risiko. Adapun objek pengawasan Inspektorat Daerah Kota Makassar terdiri dari:

a. Sekretariat Daerah	: 1 objek
b. Sekretariat DPRD	: 1 objek
c. Dinas	: 27 objek
d. Badan	: 7 objek
e. RSUD	: 1 objek
f. Kecamatan	: 15 objek
g. Sekolah	: 668 objek
h. Puskesmas	: 47 objek
i. Perumda (BUMD)	: 6 objek
Total	: 773 objek

V. PERSONIL

APIP yang terlibat dalam pengawasan tahun 2025 sebagai berikut:

- a. 1 (satu) orang Inspektur;
- b. 4 (empat) orang Inspektur Pembantu Wilayah;

- c. 48 (empat puluh delapan) orang Auditor;
- d. 8 (delapan) orang Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD).

Penunjang:

- a. 1 (satu) orang Sekretaris;
- b. 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian;
- c. 21 (dua puluh satu) orang Pelaksana;
- d. 20 (dua puluh) orang Kontrak Kerja.

VI. ANGGARAN PENGAWASAN

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kota Makassar, jumlah anggaran yang dialokasikan pada Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yaitu sebesar Rp6.232.181.300 dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jumlah Anggaran
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp 4.771.357.900
- Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp 147.630.600
- Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 1.164.857.600
- Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Rp 886.655.900
- Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Rp 41.372.800
- Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Rp 1.866.255.600
- Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp 664.585.400
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp 354.986.000
- Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Rp 68.057.600
- Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp 286.928.400
Kegiatan Perumusan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp 509.940.400
- Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rp 174.982.400
- Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Rp 334.958.000
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Rp 595.897.000
- Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 24.728.000
- Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp 182.305.400

- Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp 237.898.600
- Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp 150.965.000

VII. LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Capaian dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Tahun 2025 ini adalah terlaksananya proses pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah Kota Makassar sesuai dengan jadwal dan capaian sasaran pengawasan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan.

Capaian hasil adalah efektifnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang tercermin dari terlaksananya tindakan korektif terhadap permasalahan tertentu dengan rekomendasi yang diberikan guna mencegah meluasnya permasalahan yang menghambat pencapaian tujuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Capaian manfaat adalah terpenuhinya pelaksanaan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, pelayanan kepada masyarakat memadai dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat Daerah Kota Makassar disampaikan kepada Wali Kota.

VIII. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025 untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengawasan Kota Makassar.

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR

NOMOR : 01/188.4.45/Tahun 2025
 TANGGAL : 2 Januari 2025
 TENTANG PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP					Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	
					RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT					Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	
Inspektur Pembantu Wilayah I																
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Audit Ketaatan (Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan)	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Kecamatan Wajo	April 2025	April 2025	4	8	8	15	15	15	15.500.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Tinggi
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Audit Ketaatan (Pemeriksaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan)	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Puskesmas Jongonya Kecamatan Tamalate	Agustus 2025	Agustus 2025	4	8	8	15	15	15	15.500.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Sedang
3	UPT SDF SD Inpres Bertingkat Bara-Baraya II Kecamatan Makassar	Audit Ketaatan (Pemeriksaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan)	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Dinas Pendidikan	Februari 2025	Februari 2025	2	4	4	5	5	5	3.500,000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Sangat Tinggi
4	UPT SDF SD Inpres Malengkeri Bertingkat I Kecamatan Tamalate	Audit Ketaatan (Pemeriksaan Pengelolaan Dana Bantuan Oprasional Satuan Pendidikan)	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Dinas Pendidikan	Februari 2025	Februari 2025	2	4	4	5	5	5	3.500,000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Sangat Tinggi
5	Reviu atas layanan RSUD tahun 2025	Reviu Kinerja	Keyakinan terbatas bahwa pelayanan publik telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Dinas Kesehatan	Mei 2025	Mei 2025	3	6	6	12	12	12	9.900.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
6	Reviu atas layanan perizinan tahun 2025	Reviu Kinerja	Keyakinan terbatas bahwa pelayanan publik telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Mei 2025	Mei 2025	3	6	6	12	12	12	8.400.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
7	Reviu atas Perjalanan Dinas Tahun 2025	Reviu	Keyakinan terbatas bahwa dokumen terhadap pertanggungjawaban perjalanan dinas telah dilaksanakan sesuai ketentuan		Juli 2025	Juli 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	

8	Reviu Optimalisasi Pajak Daerah Tahun 2025	Reviu	Keyakinan terbatas bahwa pelayanan publik telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Badan Pendapatan Daerah	Juni 2025	Juni 2025	4	4	4	8	8	8	8.400.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
9	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	PDTT	Keyakinan memadai terhadap suatu permasalahan	SKPD Wilayah Irbab I	Tentatif	Tentatif	2	4	4	8	8	8	33.000.000	6 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
10	Probity Audit	PDTT	Keyakinan terbatas terhadap kesesuaian proses pengadaan barang/jasa dengan prinsip integritas (<i>integrity</i>), kebenaran (<i>uprightness</i>), dan kejujuran (<i>honesty</i>) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	SKPD Wilayah Irbab I	Tentatif	Tentatif	4	4	4	8	8	8	8.400.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
11	Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029	Reviu	Keyakinan bahwa dokumen Rancangan Akhir Renstra PD telah disusun sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma guna meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.	SKPD Wilayah Irbab I	Agustus 2025	Agustus 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	13 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
12	Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	Reviu	Keyakinan bahwa dokumen Rancangan Akhir Renja-PD telah disusun sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma guna meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.	SKPD Wilayah Irbab I	Juli 2025	Juli 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	13 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan

13	Reviu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	Reviu	Keyakinan bahwa dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja-PD telah disusun sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma guna meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.	SKPD Wilayah Irban I	Agustus 2025	Agustus 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	13 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
14	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2026	Reviu	keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi RKA SKPD sesuai dengan KUA dan PPAS serta kesesuaian dengan standar biaya, kaidah-kaidah penganggaran dan dilengkapi dokumen pendukung RKA SKPD.	SKPD Wilayah Irban I	Agustus 2025	September 2025	8	8	8	8	8	8	51.300.000	13 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
15	Reviu Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2025	Reviu	keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi Perubahan RKA SKPD sesuai dengan Perubahan KUA dan PPAS serta kesesuaian dengan standar biaya, kaidah-kaidah penganggaran dan dilengkapi dokumen pendukung Perubahan RKA SKPD.	SKPD Wilayah Irban I	September 2025	September 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	13 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
16	Reviu Harga Perkiraan Sendiri	Reviu	memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	SKPD Wilayah Irban I	Tentatif	Tentatif	8	8	8	8	8	8	0,00	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	

17	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Kesehatan TA. 2024 dan Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun Atas Penggunaan Sisa Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	Reviu	Keyakinan terbatas mengenai keandalan, keabsahan dan kesesuaian dokumen pelaksanaan anggaran dengan laporan Realisasi Akhir Tahun Penyerapan Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan	Januari 2025	Januari 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
18	Reviu Laporan Rencana Anggaran Tahun Anggaran Berjalan dan Rencana Penggunaan Sisa DAU Bidang Kesehatan Tahun 2024	Reviu	Keyakinan terbatas mengenai keandalan, keabsahan dan kesesuaian dokumen pelaksanaan anggaran dengan laporan rencana anggaran Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan	Maret 2025	Maret 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
19	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum Tahap I Tahun 2025 Bidang Kesehatan	Reviu	Keyakinan terbatas mengenai keandalan, keabsahan dan kesesuaian Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan	Agustus 2025	Agustus 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
20	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum Tahap II Tahun 2025 Bidang Kesehatan	Reviu	Keyakinan terbatas mengenai keandalan, keabsahan dan kesesuaian Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan	November 2025	November 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
21	Reviu Pengelolaan Sisa Dana Kapitasi JKN Tahun Anggaran 2024	Reviu	Keyakinan terbatas atas validasi perhitungan besaran sisa Dana Kapitasi JKN berdasarkan sumber	Dinas Kesehatan	Januari 2025	Januari 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
22	Monitoring atas Pencatatan Saldo Persediaan Akhir Tahun TA. 2025	Monitoring dan evaluasi	Keyakinan terbatas terhadap pencatatan saldo persediaan akhir tahun	SKPD Wilayah Irbn I	Desember 2025	Desember 2025	1	2	2	4	4	4	5.800.000	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
23	Monitoring atas Proses Tutup Kas Akhir Tahun SKPD TA. 2025	Monitoring dan evaluasi	Keyakinan terbatas terhadap tutup kas akhir tahun	SKPD Wilayah Irbn I	Desember 2025	Desember 2025	1	2	2	4	4	4	5.800.000	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
24	Pendampingan Penyusunan Risk Register SKPD TA. 2026	Pendampingan	Memperoleh informasi tentang pengelolaan risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan	SKPD Wilayah Irbn I	Agustus 2025	Agustus 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan

25	Evaluasi Pengelolaan Risiko	Evaluasi	Memperoleh informasi OPD mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengelolaan risiko	SKPD Wilayah Irbab I	Maret 2025	Maret 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	13 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
26	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Evaluasi	Keyakinan atas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	SKPD Wilayah Irbab I	Juni 2025	Juni 2025	3	4	8	8	8	8	0,00	8 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
27	Penanganan Pengaduan Masyarakat	PDDT	Memperoleh informasi te	SKPD Wilayah Irbab I	Tentatif	Tentatif	4	4	4	4	4	4	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
28	Monitoring Tindak Lanjut Aparat Pengawasan Internal Pemerintah	Monitoring	Kepatuhan SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam menindaklanjuti temuan APIP	SKPD Wilayah Irbab I	Januari s.d. November 2025	Januari s.d. November 2025	3	3	3	3	3	3	0,00	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
29	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan	Monitoring	Kepatuhan SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam menindaklanjuti temuan BPK RI	Seluruh SKPD	Januari s.d. November 2025	Januari s.d. November 2025	1	1	1	1	6	3	1.500.000	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
30	Konsultasi Pengawasan	Consulting	Memberikan jasa Quality Assurance	SKPD Wilayah Irbab I	Tentatif	Tentatif	0	1	1	1	1	1	0,00	10 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
Inspektur Pembantu Wilayah II																
1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Audit Ketaatan (Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan)	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Dinas Perdagangan	April 2025	April 2025	4	8	8	15	15	15	15.500.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Sedang
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Audit Ketaatan (Pemeriksaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan)	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Puskesmas Bira Kecamatan Tamalanrea	Agustus 2025	Agustus 2025	4	8	8	15	15	15	15.500.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Sedang

3	UPT SDF SD Negeri Tallo Tua 69 Kecamatan Tallo	Audit Ketaatan (Pemeriksaan Pengelolaan Dana Bantuan Oprasional Satuan Pendidikan)	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Dinas Pendidikan	Februari 2025	Februari 2025	2	4	4	5	5	5	3,500,000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Sangat Tinggi
4	UPT SDF SD Inpres Unggulan Toddopuli Kecamatan Panakukang	Audit Ketaatan (Pemeriksaan Pengelolaan Dana Bantuan Oprasional Satuan Pendidikan)	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Dinas Pendidikan	Februari 2025	Februari 2025	2	4	4	5	5	5	3,500,000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Sangat Tinggi
5	Program Penanggulangan Bencana	Audit Kinerja	Keyakinan memadai terhadap 3E + ketaatan pelaksanaan suatu program, kegiatan dan sub kegiatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Februari 2025	Februari 2025	3	6	6	12	12	12	9.900.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Tinggi
6	Reviu Kinerja atas Pelayanan Publik pada Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Reviu Kinerja	Keyakinan terbatas bahwa pelayanan publik telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Mei 2025	Mei 2025	3	6	6	12	12	12	9.900.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
7	Reviu atas Perjalanan Dinas Tahun 2025	Reviu	Keyakinan terbatas bahwa dokumen terhadap pertanggungjawaban perjalanan dinas telah dilaksanakan sesuai ketentuan		Juni 2025	Juni 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
8	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	PDTT	Keyakinan memadai terhadap suatu permasalahan	SKPD Wilayah Irbab II	Tentatif	Tentatif	2	4	4	8	8	8	33.000.000	6 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
9	Probit Audit	PDTT	Keyakinan terbatas terhadap kesesuaian proses pengadaan barang/jasa dengan prinsip integritas (<i>integrity</i>), kebenaran (<i>uprightness</i>), dan kejujuran (<i>honesty</i>) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	SKPD Wilayah Irbab II	Tentatif	Tentatif	4	4	4	8	8	8	8.400.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	

27	Konsultasi Pengawasan	Consulting	Memberikan jasa Quality Assurance	SKPD Wilayah Irban II	Tentatif	Tentatif	0	1	1	1	1	1	0,00	10 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
Inspektur Pembantu Wilayah III																
1	Program Pengendalian Penduduk	Audit Ketaatan (Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan)	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	April 2025	April 2025	4	8	8	15	15	15	15.500.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Tinggi
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Audit Ketaatan (Pemeriksaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan)	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Puskesmas Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini	Agustus 2025	Agustus 2025	4	8	8	15	15	15	15.500.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Sedang
3	UPT SDF SD Negeri Cendrawasih I Kecamatan Mamajang	Audit Ketaatan (Pemeriksaan Pengelolaan Dana Bantuan Oprasional Satuan Pendidikan)	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Dinas Pendidikan	February 2025	February 2025	2	4	4	5	5	5	3,500,000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Sangat Tinggi
4	UPT SDF SD Inpres Unggulan BTN Pemda Kecamatan Rappocini	Audit Ketaatan (Pemeriksaan Pengelolaan Dana Bantuan Oprasional Satuan Pendidikan)	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Dinas Pendidikan	Februari 2025	Februari 2025	2	4	4	5	5	5	3,500,000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Sangat Tinggi
5	Reviu Kinerja atas Pelayanan Publik pada Sektor Pendidikan	Reviu Kinerja	Keyakinan terbatas bahwa pelayanan publik telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Dinas Pendidikan	Mei 2025	Mei 2025	3	6	6	12	12	12	9.900.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
6	Reviu atas Perjalanan Dinas Tahun 2025	Reviu	Keyakinan terbatas bahwa dokumen terhadap pertanggungjawaban perjalanan dinas telah dilaksanakan sesuai ketentuan		Juni 2025	Juni 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
7	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	PDTT	Keyakinan memadai terhadap suatu permasalahan	SKPD Wilayah Irban III	Tentatif	Tentatif	2	4	4	8	8	8	33.000.000	6 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	

10	Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029	Reviu	Keyakinan bahwa dokumen Rancangan Akhir Renstra PD telah disusun sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma guna meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.	SKPD Wilayah Irbab II	Agustus 2025	Agustus 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	13 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
11	Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	Reviu	Keyakinan bahwa dokumen Rancangan Akhir Renja-PD telah disusun sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma guna meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.	SKPD Wilayah Irbab II	Juli 2025	Juli 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	13 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
12	Reviu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	Reviu	Keyakinan bahwa dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja-PD telah disusun sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma guna meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.	SKPD Wilayah Irbab II	Agustus 2025	Agustus 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	13 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
13	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2026	Reviu	keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi RKA SKPD sesuai dengan KUA dan PPAS serta kesesuaian dengan standar biaya, kaidah-kaidah penganggaran dan dilengkapi dokumen pendukung RKA SKPD.	SKPD Wilayah Irbab II	Agustus 2025	September 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	13 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan

14	Reviu Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2025	Reviu	keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi Perubahan RKA SKPD sesuai dengan Perubahan KUA dan PPAS serta kesesuaian dengan standar biaya, kaidah-kaidah penganggaran dan dilengkapi dokumen pendukung Perubahan RKA SKPD.	SKPD Wilayah Irbab II	September 2025	September 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	13 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
15	Reviu Harga Perkiraan Sendiri	Reviu	memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	SKPD Wilayah Irbab II	Tentatif	Tentatif	8	8	8	8	8	8	0,00	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
16	Reviu Pengadaan ASN Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025	Reviu	Keyakinan terbatas atas pengadaan ASN tahapan perencanaan, pengumuman dan pelamaran, seleksi administrasi dan pelaksanaan seleksi kompetensi	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	April dan November 2025	April dan November 2025	4	4	4	8	8	8	16.800.000	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
17	Reviu Manajemen ASN	Reviu	Keyakinan terbatas atas Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, dan Mutasi ASN	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Juni 2025	Juni 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
18	Monitoring atas Pencatatan Saldo Persediaan Akhir Tahun TA. 2025	Monitoring dan evaluasi	Keyakinan terbatas terhadap pencatatan saldo persediaan akhir tahun	SKPD Wilayah Irbab II	Desember 2025	Desember 2025	1	2	2	4	4	4	5.800.000	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
19	Monitoring atas Proses Tutup Kas Akhir Tahun SKPD TA. 2025	Monitoring dan evaluasi	Keyakinan terbatas terhadap tutup kas akhir tahun	SKPD Wilayah Irbab II	Desember 2025	Desember 2025	1	2	2	4	4	4	5.800.000	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan

20	Pendampingan Penyusunan Risk Register SKPD TA. 2026	Pendampingan	Memperoleh informasi tentang pengelolaan risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan	SKPD Wilayah Irbn II	Agustus 2025	Agustus 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
21	Evaluasi Pengelolaan Risiko	Evaluasi	Memperoleh informasi OPD mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengelolaan risiko	SKPD Wilayah Irbn II	Maret 2025	Maret 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
22	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Evaluasi	Keyakinan atas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	SKPD Wilayah Irbn II	Juni 2025	Juni 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	9 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
23	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Klarifikasi	Memperoleh informasi terkait materi pengaduan	SKPD Wilayah Irbn II	Tentatif	Tentatif	4	4	4	4	4	4	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
24	Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah	Monitoring	Keyakinan memadai pengujian kesesuaian data pengendalian inflasi daerah	Dinas Perdagangan	Januari s.d. Desember 2025	Januari s.d. Desember 2025	12	12	20	20	20	20	0,00	12 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
25	Monitoring Tindak Lanjut Aparat Pengawasan Internal Pemerintah	Monitoring	Kepatuhan SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam menindaklanjuti temuan APIP	SKPD Wilayah Irbn II	Januari s.d. November 2025	Januari s.d. November 2025	3	3	3	3	3	3	0,00	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
26	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan	Monitoring	Kepatuhan SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam menindaklanjuti temuan BPK RI	Seluruh SKPD	Januari s.d. November 2025	Januari s.d. November 2025	1	1	1	1	6	3	1.500.000	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan

8	Probit Audit	PDTT	Keyakinan terbatas terhadap kesesuaian proses pengadaan barang/jasa dengan prinsip integritas (<i>integrity</i>), kebenaran (<i>uprightness</i>), dan kejujuran (<i>honesty</i>) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	SKPD Wilayah Irbab III	Tentatif	Tentatif	4	4	4	8	8	8	8.400.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
9	Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029	Reviu	Keyakinan bahwa dokumen Rancangan Akhir Renstra PD telah disusun sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma guna meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.	SKPD Wilayah Irbab III	Agustus 2025	Agustus 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	13 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
10	Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	Reviu	Keyakinan bahwa dokumen Rancangan Akhir Renja-PD telah disusun sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma guna meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.	SKPD Wilayah Irbab III	Juli 2025	Juli 2025	3	4	8	8	8	8	0,00	13 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
11	Reviu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	Reviu	Keyakinan bahwa dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja-PD telah disusun sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma guna meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.	SKPD Wilayah Irbab III	Agustus 2025	Agustus 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	13 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan

12	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2026	Reviu	keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi RKA SKPD sesuai dengan KUA dan PPAS serta kesesuaian dengan standar biaya, kaidah-kaidah penganggaran dan dilengkapi dokumen pendukung RKA SKPD.	SKPD Wilayah Irbab III	Agustus 2025	September 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	13 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
13	Reviu Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2025	Reviu	keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi Perubahan RKA SKPD sesuai dengan Perubahan KUA dan PPAS serta kesesuaian dengan standar biaya, kaidah-kaidah penganggaran dan dilengkapi dokumen pendukung Perubahan RKA SKPD.	SKPD Wilayah Irbab III	September 2025	September 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	13 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
14	Reviu Harga Perkiraan Sendiri	Reviu	memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	SKPD Wilayah Irbab III	Tentatif	Tentatif	8	8	8	8	8	8	0,00	3 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
15	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan TA. 2024 dan Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun Atas Penggunaan Sisa Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	Reviu	Keyakinan terbatas mengenai keandalan, keabsahan dan kesesuaian dokumen pelaksanaan anggaran dengan laporan realisasi akhir tahun penyerapan Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan	Januari 2025	Januari 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan

16	Reviu Laporan Rencana Anggaran Tahun Anggaran Berjalan dan Rencana Penggunaan Sisa DAU Bidang Pendidikan Tahun 2024	Reviu	Keyakinan terbatas mengenai keandalan, keabsahan dan kesesuaian dokumen pelaksanaan anggaran dengan laporan rencana anggaran TA Berjalan dan Penggunaan Sisa Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan	Maret 2025	Maret 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
17	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum Tahap I Tahun 2025 Bidang Pendidikan	Reviu	Keyakinan terbatas mengenai keandalan, keabsahan dan kesesuaian Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan	Agustus 2025	Agustus 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
18	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum Tahap II Tahun 2025 Bidang Pendidikan	Reviu	Keyakinan terbatas mengenai keandalan, keabsahan dan kesesuaian Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan	November 2025	November 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
19	Reviu atas Pemberian THR dan Gaji 13 Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tahap I	Reviu	Keyakinan terbatas mengenai keandalan, keabsahan dan kesesuaian Pemberian THR dan Gaji 13 Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) TA. 2025	Dinas Pendidikan	Juni 2025	Juni 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
20	Reviu atas Pemberian THR dari Tunjangan Tambahan Penghasilan (Tamsil) dan Pemberian Gaji 13 dari Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) untuk ASN Guru	Reviu	Keyakinan terbatas mengenai keandalan, keabsahan dan kesesuaian Pemberian THR dan Gaji 13 Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) TA. 2025	Dinas Pendidikan	Juni 2025	Juni 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan

21	Monitoring atas Pencatatan Saldo Persediaan Akhir Tahun TA. 2025	Monitoring dan evaluasi	Keyakinan terbatas terhadap pencatatan saldo persediaan akhir tahun	SKPD Wilayah Irbn III	Desember 2025	Desember 2025	1	2	2	4	4	4	5.800.000	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
22	Monitoring atas Proses Tutup Kas Akhir Tahun SKPD TA. 2025	Monitoring dan evaluasi	Keyakinan terbatas terhadap tutup kas akhir tahun	SKPD Wilayah Irbn III	Desember 2025	Desember 2025	1	2	2	4	4	4	5.800.000	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
23	Pendampingan Penyusunan Risk Register SKPD TA. 2026	Pendampingan	Memperoleh informasi tentang pengelolaan risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan	SKPD Wilayah Irbn III	Agustus 2025	Agustus 2025	8	8	8	8	8	8		1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
24	Evaluasi Pengelolaan Risiko	Evaluasi	Memperoleh informasi OPD mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengelolaan risiko	SKPD Wilayah Irbn III	Maret 2025	Maret 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
25	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Evaluasi	Keyakinan atas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	SKPD Wilayah Irbn III	Juni 2025	Juni 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	9 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
26	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Klarifikasi	Memperoleh informasi terkait materi pengaduan	SKPD Wilayah Irbn III	Tentatif	Tentatif	1	2	4	4	4	4	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
27	Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Reviu	Keyakinan terbatas memastikan mutu (<i>quality assurance</i>) atas penyelenggaraan PUG dan PPRG serta mendorong komitmen para pemangku kepentingan untuk mengupayakan PUG melalui PPRG	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	April 2025	April 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan

28	Monitoring Tindak Lanjut Aparat Pengawasan Internal Pemerintah	Monitoring	Kepatuhan SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam menindaklanjuti temuan APIP	SKPD Wilayah Irbab III	Januari s.d. November 2025	Januari s.d. November 2025	1	2	3	3	3	3	0,00	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
29	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan	Monitoring	Kepatuhan SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam menindaklanjuti temuan BPK RI	Seluruh SKPD	Januari s.d. November 2025	Januari s.d. November 2025	1	1	1	1	6	3	1.500.000	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
30	Konsultasi Pengawasan	Consulting	Memberikan jasa Quality Assurance	SKPD Wilayah Irbab III	Tentatif	Tentatif	0	1	1	1	1	1	0,00	10 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
IV	Inspektur Pembantu Wilayah IV															
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Audit Ketaatan (Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan)	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	April 2025	April 2025	4	8	8	15	15	15	15.500.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Tinggi
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Audit Ketaatan (Pemeriksaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan)	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Puskesmas Sudiang Kecamatan Biringkanaya	Agustus 2025	Agustus 2025	4	8	8	15	15	15	15.500.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Sedang
3	UPT SDF SD Negeri PAI Kecamatan Biringkanaya	Audit Ketaatan (Pemeriksaan Pengelolaan Dana Bantuan Oprasional Satuan Pendidikan)	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Dinas Pendidikan	Februari 2025	Februari 2025	2	4	4	5	5	5	3.500,000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Sangat Tinggi
4	UPT SDF SD Negeri Mangkura II Kecamatan Ujung Pandang	Audit Ketaatan (Pemeriksaan Pengelolaan Dana Bantuan Oprasional Satuan Pendidikan)	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Dinas Pendidikan	Februari 2025	Februari 2025	2	4	4	5	5	5	3.500,000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Sangat Tinggi
5	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	PDTT	Keyakinan memadai terhadap suatu permasalahan	SKPD Wilayah Irbab IV	Tentatif	Tentatif	2	4	4	8	8	8	33.000.000	6 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	

6	Probity Audit	PDTT	Keyakinan terbatas terhadap kesesuaian proses pengadaan barang/jasa dengan prinsip integritas (<i>integrity</i>), kebenaran (<i>uprightness</i>), dan kejujuran (<i>honesty</i>) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	SKPD Wilayah Irbab IV	Tentatif	Tentatif	4	4	4	8	8	8	16.800.000	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
7	Reviu atas Honorarium Tahun 2025	Reviu	Keyakinan terbatas bahwa dokumen terhadap pertanggungjawaban honorarium telah dilaksanakan sesuai ketentuan		Juni 2025	Juni 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
8	Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029	Reviu	Keyakinan bahwa dokumen Rancangan Akhir Renstra PD telah disusun sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma guna meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.	SKPD Wilayah Irbab IV	Agustus 2025	Agustus 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	13 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
9	Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	Reviu	Keyakinan bahwa dokumen Rancangan Akhir Renja-PD telah disusun sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma guna meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.	SKPD Wilayah Irbab IV	Juli 2025	Juli 2025	3	4	8	8	8	8	0,00	13 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
10	Reviu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	Reviu	Keyakinan bahwa dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja-PD telah disusun sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma guna meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.	SKPD Wilayah Irbab IV	Agustus 2025	Agustus 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	13 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan

11	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2026	Reviu	keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi RKA SKPD sesuai dengan KUA dan PPAS serta kesesuaian dengan standar biaya, kaidah-kaidah penganggaran dan dilengkapi dokumen pendukung RKA SKPD.	SKPD Wilayah Irban IV	Agustus 2025	September 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	13 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
12	Reviu Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2025	Reviu	keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi Perubahan RKA SKPD sesuai dengan Perubahan KUA dan PPAS serta kesesuaian dengan standar biaya, kaidah-kaidah penganggaran dan dilengkapi dokumen pendukung Perubahan RKA SKPD.	SKPD Wilayah Irban IV	September 2025	September 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	13 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
13	Reviu Harga Perkiraan Sendiri	Reviu	memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	SKPD Wilayah Irban IV	Tentatif	Tentatif	8	8	8	8	8	8	0,00	3 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
14	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum TA. 2024 dan Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun Atas Penggunaan Sisa Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pekerjaan Umum	Reviu	Keyakinan terbatas mengenai keandalan, keabsahan dan kesesuaian dokumen pelaksanaan anggaran dengan laporan rencana anggaran Dana Alokasi Umum	Dinas Pekerjaan Umum	Januari 2025	Januari 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan

15	Reviu Laporan Rencana Anggaran Tahun Anggaran Berjalan dan Rencana Penggunaan Sisa DAU Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024	Reviu	Keyakinan terbatas mengenai keandalan, keabsahan dan kesesuaian dokumen pelaksanaan anggaran dengan laporan rencana anggaran Dana Alokasi Umum	Dinas Pekerjaan Umum	Maret 2025	Maret 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
16	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum Tahap I Tahun 2025 Bidang Pekerjaan Umum	Reviu	Keyakinan terbatas mengenai keandalan, keabsahan dan kesesuaian Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum	Dinas Pekerjaan Umum	Agustus 2025	Agustus 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
17	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum Tahap II Tahun 2025 Bidang Pekerjaan Umum	Reviu	Keyakinan terbatas mengenai keandalan, keabsahan dan kesesuaian Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum	Dinas Pekerjaan Umum	November 2025	November 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
18	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun Pembayaran Dukungan Penggajian PPPK Daerah Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 dan Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun Atas Penggunaan Sisa Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Daerah Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024	Reviu	Keyakinan terbatas mengenai keandalan, keabsahan dan kesesuaian dokumen pelaksanaan anggaran dengan laporan rencana anggaran Dana Alokasi Umum	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Januari 2025	Januari 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
19	Reviu Laporan Rencana Penggunaan Sisa DAU Dukungan Penggajian PPPK Daerah tahun sebelumnya Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024	Reviu	Keyakinan terbatas mengenai keandalan, keabsahan dan kesesuaian dokumen pelaksanaan anggaran dengan laporan rencana anggaran Dana Alokasi Umum	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Januari 2025	Januari 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
20	Reviu Laporan rencana pembayaran dukungan penggajian PPPK Daerah yang diangkat pada tahun berkenaan	Reviu	Keyakinan terbatas pada Laporan Realisasi Pengangkatan dan Pembayaran Belanja Pegawai PPPK	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Januari s.d Desember 2025	Januari s.d Desember 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	12 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan

21	Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2025	Reviu	Keyakinan terbatas terhadap kesesuaian pengelolaan BMD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah	Mei 2025	Mei 2025	4	4	4	8	8	8	8.400.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
22	Reviu Analisis Standar Belanja TA. 2026	Reviu	Keyakinan terbatas terhadap kewajaran nilai ASB	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Juni 2025	Juni 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
23	Reviu Standar Harga Satuan TA. 2026	Reviu	Keyakinan terbatas terhadap akurasi, keandalan dan keabsahan data harga yang disajikan dalam dokumen Standar Harga Satuan (SHS)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Juni 2025	Juni 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
24	Monitoring atas Pencatatan Saldo Persediaan Akhir Tahun TA. 2025	Monitoring dan evaluasi	Keyakinan terbatas terhadap pencatatan saldo persediaan akhir tahun	SKPD Wilayah Irbab IV	Desember 2025	Desember 2025	1	2	2	4	4	4	5.800.000	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
25	Monitoring atas Proses Tutup Kas Akhir Tahun SKPD TA. 2025	Monitoring dan evaluasi	Keyakinan terbatas terhadap tutup kas akhir tahun	SKPD Wilayah Irbab IV	Desember 2025	Desember 2025	1	2	2	4	4	4	5.800.000	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
26	Pendampingan Penyusunan Risk Register SKPD TA. 2026	Pendampingan	Memperoleh informasi tentang pengelolaan risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan	SKPD Wilayah Irbab IV	Agustus 2025	Agustus 2025	3	4	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
27	Evaluasi Pengelolaan Risiko	Evaluasi	Memperoleh informasi OPD mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengelolaan risiko	SKPD Wilayah Irbab IV	Maret 2025	Maret 2025	3	4	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan

28	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Evaluasi	Keyakinan atas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	SKPD Wilayah Irbab IV	Juni 2025	Juni 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	9 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
29	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Klarifikasi	Memperoleh informasi terkait materi pengaduan	SKPD Wilayah Irbab IV	Tentatif	Tentatif	1	2	4	4	4	4	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
30	Monitoring Tindak Lanjut Aparat Pengawasan Internal Pemerintah	Monitoring	Kepatuhan SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam menindaklanjuti temuan APIP	SKPD Wilayah Irbab IV	Januari s.d. November 2025	Januari s.d. November 2025	1	2	3	3	3	3	0,00	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
31	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan	Monitoring	Kepatuhan SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam menindaklanjuti temuan BPK RI	Seluruh SKPD	Januari s.d. November 2025	Januari s.d. November 2025	1	1	1	1	6	3	6.000.000	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
32	Konsultasi Pengawasan	Consulting	Memberikan jasa <i>Quality Assurance</i>	SKPD Wilayah Irbab IV	Tentatif	Tentatif	0	1	1	1	1	1	0,00	10 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	
V Lintas Irbab																
1	Audit Kinerja Lintas Sektor Penanganan Stunting Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Audit Kinerja	Keyakinan memadai terhadap 3E + ketaatan pelaksanaan suatu program, kegiatan dan sub kegiatan	Kecamatan Ujung Pandang	Februari 2025	Februari 2025	3	6	6	12	12	12	9.900.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Sedang
2	Audit Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah	Audit Ketaatan (Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan)	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	PDAM	April 2025	April 2025	4	8	8	15	15	15	15.500.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	Tinggi
3	Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Audit	Keyakinan Memadai terhadap kesesuaian Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Komunikasi dan Informatika	Juni 2025	Juni 2025	4	4	4	8	8	8	8.400.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan	

4	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penyaluran Bantuan Keuangan	PDTT	Keyakinan memadai terhadap suatu permasalahan	Lintas Wilayah	Juli 2025	Juli 2025	2	4	4	8	8	8	6.600.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
5	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Bantuan Hibah Tahun 2025	PDTT	Keyakinan memadai terhadap suatu permasalahan	Lintas Wilayah	Juli 2025	Juli 2025	2	4	4	8	8	8	6.600.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
6	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Bantuan Sosial Tahun 2025	PDTT	Keyakinan memadai terhadap suatu permasalahan	Lintas Wilayah	Juli 2025	Juli 2025	2	4	4	8	8	8	6.600.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
7	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2024	Reviu	Keyakinan terbatas terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Maret 2025	Maret 2025	8	8	8	15	15	15	18.900.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
8	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Reviu	Keyakinan terbatas terhadap keandalan dan keabsahan Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK	Seluruh SKPD	Februari, Juni, Juli, Oktober, November, Desember 2025	Februari, Juni, Juli, Oktober, November, Desember 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	28 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
9	Reviu Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	Reviu	Keyakinan terbatas terhadap sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota dengan Prioritas pembangunan provinsi dan pusat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Juli 2025	Juli 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
10	Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Reviu	Keyakinan terbatas terhadap sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota dengan Prioritas pembangunan provinsi dan pusat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Mei 2025	Mei 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
11	Reviu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	Reviu	Keyakinan terbatas terhadap sinkronisasi Perubahan kebijakan Pemerintah Kota dengan Prioritas pembangunan provinsi dan pusat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Juni 2025	Juni 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan

12	Reviu Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara TA. 2026	Reviu	Keyakinan terbatas kesesuaian informasi dalam KUA dan PPAS dengan informasi dalam RKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Juni 2025	Juni 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
13	Reviu Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara TA. 2025	Reviu	Keyakinan terbatas kesesuaian informasi dalam perubahan KUA dan PPAS dengan informasi dalam Perubahan RKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Juli 2025	Agustus 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
14	Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024	Reviu	Keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja instansi pemerintah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Maret 2025	Maret 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
15	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024	Reviu	Keyakinan terbatas telah disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Januari 2025	Januari 2025	4	4	4	8	8	8	8.400.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
16	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa	Reviu	Keyakinan terbatas terhadap penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah	Maret, Juni, September dan Desember 2025	April, Juli, Oktober dan Desember 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	4 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
17	Reviu Pencegahan Korupsi Terkait Program Makanan Bergizi Sehat TA. 2025	Reviu	Keyakinan terbatas bahwa program makanan bergizi sehat telah dilaksanakan sesuai ketentuan		Agustus 2025	Agustus 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan

18	Evaluasi Reformasi Birokrasi	Evaluasi	Memastikan kualitas dan keselarasan perencanaan level pemerintah daerah dan unit kerja, serta memastikan pelaksanaan rencana aksi berlangsung secara baik serta sesuai maksud dan ketentuan	Seluruh SKPD	Februari, Maret, Juni, September, Desember 2025	Februari, April, Juli, September, Desember 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	5 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
19	Reviu Laporan Realisasi Akhir Tahun Penyerapan Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun 2024 dan Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun Atas Penggunaan Sisa Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Reviu	Keyakinan terbatas terhadap akurasi, keandalan dan keabsahan penggunaan Dana Alokasi Umum	Seluruh Kelurahan	Januari 2025	Januari 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
20	Reviu Laporan Rencana Anggaran Penggunaan Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2025	Reviu	Keyakinan terbatas terhadap akurasi, keandalan dan keabsahan penggunaan Dana Alokasi Umum	Seluruh Kelurahan	Maret 2025	Maret 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
21	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahap I Tahun Anggaran 2025	Reviu	Keyakinan terbatas terhadap akurasi, keandalan dan keabsahan penggunaan Dana Alokasi Umum	Seluruh Kelurahan	Agustus 2025	Agustus 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan

22	Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) TA. 2025	Reviu	Keyakinan bahwa Pengadaan Barang/Jasa telah memperhatikan pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan penggunaan produk dalam negeri	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah	April 2025	April 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
23	Reviu Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Reviu	Keyakinan terbatas atas Pemenuhan Pelayanan Dasar, SPM telah terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta SPM tercapai dan teridentifikasi kendala penerapan SPM	Seluruh SKPD	Maret 2025	Maret 2025	1	1	1	1	1	8	2.800.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
24	Reviu Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-Purchasing	Reviu	Keyakinan terbatas atas pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-Purchasing telah sesuai ketentuan	Seluruh SKPD	Maret 2025	Maret 2025	8	8	8	8	8	8	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
VI Sub Bagian Perencanaan															
1	Kapabilitas APIP	Penilaian Mandiri	Meningkatkan kapabilitas APIP agar berada di Level 3 penuh dalam rangka terwujudnya pengawsan intern yang efektif	Inspektorat Daerah	Maret 2025	Juni 2025							117.384.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi	Penilaian Mandiri	Tingkat kematangan SPIP Terintegrasi dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian	Seluruh SKPD	Maret 2025	Juni 2025							96.958.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan

3	Bimbingan Teknis Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi	Bimbingan Teknis	Tingkat kematangan SPIP Terintegrasi dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian	Seluruh SKPD	Mei 2025	Mei 2025								172.300.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
4	Bimbingan Teknis Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	Bimbingan Teknis	Tingkat kematangan SPIP Terintegrasi dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian	Inspektorat Daerah	September 2025	September 2025								109.400.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
5	Sosialisasi Manajemen Risiko	Sosialisasi	Meningkatkan pemahaman kesadaran akan penerapan manajemen risiko dalam setiap kegiatan	Seluruh SKPD	April 2025	April 2025								87.300.000	1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
6	Forum Perangkat Daerah	Sosialisasi	Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Makassar	Seluruh SKPD	Februari dan April 2025	Februari dan April 2025								80.600.000	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
VII Sub Bagian Umum dan Kepegawaian																
1	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Inspektorat Daerah Kota Makassar	Diklat Pembentukan dan Substansi	Meningkatnya kompetensi pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar	Inspektorat Daerah	Januari 2025	Desember 2025								12.781.692.000,00	87 Orang	Laptop, ATK, Printer, Scan
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelatihan Dikantor Sendiri	Meningkatnya kompetensi pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar	Inspektorat Daerah	Januari 2025	Desember 2025								33.187.000,00	61 Orang	Laptop, ATK, Printer, Scan
VIII Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan																
1	Monitoring Kepatuhan Pelaporan LHKPN dan LHKAN	Monitoring	Meningkatkan kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKAN	Seluruh SKPD	Januari 2025	Maret 2025									2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan

2	Optimalisasi Tugas dan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi	Monitoring	Memberikan arah dan sebagai acuan bagi ASN dan Pemerintah Daerah yang terkait dengan pemberian, penerimaan, dan permintaan gratifikasi	Seluruh SKPD	Juli dan Desember 2025	Juli dan Desember 2025								2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
3	Penilaian Internal Zona Integritas	Evaluasi	Keyakinan atas informasi yang lebih obyektif tentang kemajuan, hambatan dan kendala dalam proses Pembangunan Zona Integritas.	Seluruh SKPD	Juli 2025	Juli 2025								3 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
4	Bimbingan Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi	Bimbingan Teknis	Meningkatkan pemahaman dalam mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan	Seluruh SKPD	Juni 2025	Juni 2025						55.100.000		1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
5	Bimbingan Teknis Evaluasi SAKIP SKPD	Bimbingan Teknis	memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada aparatur pemerintah dalam melaksanakan evaluasi SAKIP, menganalisis hasil evaluasi SAKIP dan menyusun rencana tindak lanjut yang efektif	Seluruh SKPD	June 2025	June 2025						79.100.000		1 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
6	Sosialisasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas	Sosialisasi	Untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi	Seluruh SKPD	Mei, Juni, Oktober dan November 2025	Mei, Juni, Oktober dan November 2025						139.600.000		4 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
7	Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar	Sosialisasi	Meningkatkan pemahaman kesadaran akan urgensi serta strategi yang diperlukan dalam upaya memerangi praktek pungutan liar	Seluruh SKPD	Januari 2025	Desember 2025								12 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan

8	Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Sosialisasi	Meningkatkan pemahaman kesadaran akan urgensi serta strategi yang diperlukan dalam upaya pencegahan korupsi	Seluruh SKPD	Januari 2025	Desember 2025									716.800.000	32 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan
9	Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Temuan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah	Pemuktahiran Data	Kepatuhan SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam menindaklanjuti temuan APIP	Seluruh SKPD	Juli dan November 2025	Juli dan November 2025									361.600.000	2 Laporan	Laptop, ATK, Printer, Scan

WALI KOTA MAKASSAR.

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan